

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki populasi penduduk dengan jumlah besar. Data yang diambil dari *bps.go.id* menyebutkan bahwa jumlah penduduk di Indonesia saat ini sebanyak 255.461.700 orang. Dengan jumlah penduduk yang besar tersebut, tentu saja Indonesia membutuhkan lapangan pekerjaan yang banyak untuk mencukupi kehidupan masyarakatnya. Namun, lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia belum mencukupi untuk menampung seluruh perekonomian masyarakat. Hal ini membuat banyak sekali masyarakat Indonesia yang tidak mendapatkan lapangan pekerjaan. Keadaan ini mendorong beberapa di antara mereka untuk membuat lapangan pekerjaan atau usaha sendiri. Usaha yang mereka mulai dari bawah dengan modal kecil ini dalam perspektif ekonomi digolongkan ke dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Sementara itu, Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Disisi lain, Usaha Menengah adalah usaha

ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil dan usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dikatakan bahwa salah satu tujuan diberdayakannya UMKM adalah meningkatkan peran usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan, dari pernyataan ini, UMKM sebenarnya memiliki peran untuk dapat mengembangkan perekonomian Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Koperasi dan UMKM yang disadur dari halaman situs www.bps.go.id pada tahun 2005 tercatat jumlah UMKM adalah 44,69 juta unit atau 99,9% dari jumlah total unit usaha, sector UMKM menyerap 77,68 juta tenaga kerja atau 96,77% dari total angkatan kerja yang bekerja, dan kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB cukup signifikan yakni sebesar 54,22% dari total PDB.

Marbun (1997) mengungkapkan bahwa salah satu kelemahan usaha kecil yang ada di Indonesia, yaitu pada umumnya mereka tidak menguasai dan tidak mempraktekkan sistem keuangan yang memadai. Hal ini karena mereka tidak atau belum memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik dalam mengelola catatan

akuntansi secara ketat dan berdisiplin dengan pembukuan yang teratur, dalam periode harian, mingguan, bulanan, dan seterusnya, sehingga banyak diantara mereka yang belum memahami pentingnya pencatatan dan pembukuan bagi kelangsungan usaha mereka.

Dalam Megginson (2000) yang dikutip oleh Pinasti (2007) menyebutkan bahwa informasi yang dihasilkan oleh proses akuntansi mempunyai peran penting untuk mencapai keberhasilan usaha, termasuk bagi usaha kecil. Menurut Suhairi, dkk (2004), juga mengatakan bahwa informasi yang diperoleh dari akuntansi dapat menjadi dasar yang andal bagi pengambilan keputusan untuk pengelolaan usaha kecil dan menengah antara lain untuk keputusan investasi.

Penyusunan laporan keuangan juga dikuatkan dengan adanya Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Kemudian pemerintah juga menerbitkan Surat Edaran No. 11/37/DKDU/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi Bank Perkreditan Rakyat. Dalam SAK-ETAP dikatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu.

Menurut Hariyanto (1999), bagi sebagian besar UMKM, pemanfaatan informasi akuntansi belum terlalu penting karena mereka merasa tidak membutuhkan informasi akuntansi. Hal ini juga ditegaskan oleh Idrus (2000), bahwa mereka juga menganggap akuntansi merupakan sesuatu yang sangat sulit

untuk dijangkau . Dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pinasti (2001), terhadap Pengusaha UMKM di Wilayah Propinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa penyelenggaraan dan penggunaan informasi akuntansi terbukti efektif secara empiris mempunyai pengaruh terhadap persepsi pengusaha kecil atas informasi akuntansi. Dapat dianggap bahwa ketika pengusaha kecil telah merasakan manfaat atas keberadaan informasi akuntansi maka para pengusaha tersebut akan menganggap bahwa informasi akuntansi penting untuk mereka, namun apabila selama pengusaha kecil tersebut tidak pernah menggunakan informasi akuntansi maka informasi akuntansi dianggap sesuatu yang tidak penting.

Dalam penelitian tersebut juga diterangkan bahwa para pedagang kecil di pasar tradisional Kabupaten Banyumas selama ini tidak menyelenggarakan dan tidak menggunakan informasi akuntansi dalam pengelolaan usahanya. Keputusan-keputusan dalam pengelolaan usaha lebih banyak didasarkan pada informasi-informasi non akuntansi dan pengamatan sepintas atas situasi pasar, sehingga yang terjadi adalah informasi akuntansi menjadi tidak penting bagi para pedagang kecil tersebut. Hal ini juga ditegaskan lagi oleh pernyataan yang disampaikan Sasongko (2009), bahwa sebagian besar usaha kecil dan menengah harus tutup bukan karena tidak adanya pembukuan, namun karena tidak diaplikasikannya akuntansi dalam system pembukuan mereka.

Berdasarkan dari pemaparan di atas, maka penulis berkeinginan untuk meneliti seberapa besar pemahaman akuntansi pengusaha UMKM, dan seberapa besar kebutuhan akan pemahaman akuntansi bagi pelaku UMKM.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimana pemahaman akuntansi dari pelaku usaha UMKM di Kota Bukittinggi khususnya di Kawasan Pasar Aur Kuning?
- Bagaimana pendapat pelaku usaha UMKM akan kebutuhan praktik akuntansi bagi pelaku usaha UMKM di Kota Bukittinggi khususnya di Kawasan Pasar Aur Kuning?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman akuntansi, dan tingkat kebutuhan untuk melakukan pembukuan bagi pelaku usaha UMKM.

Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

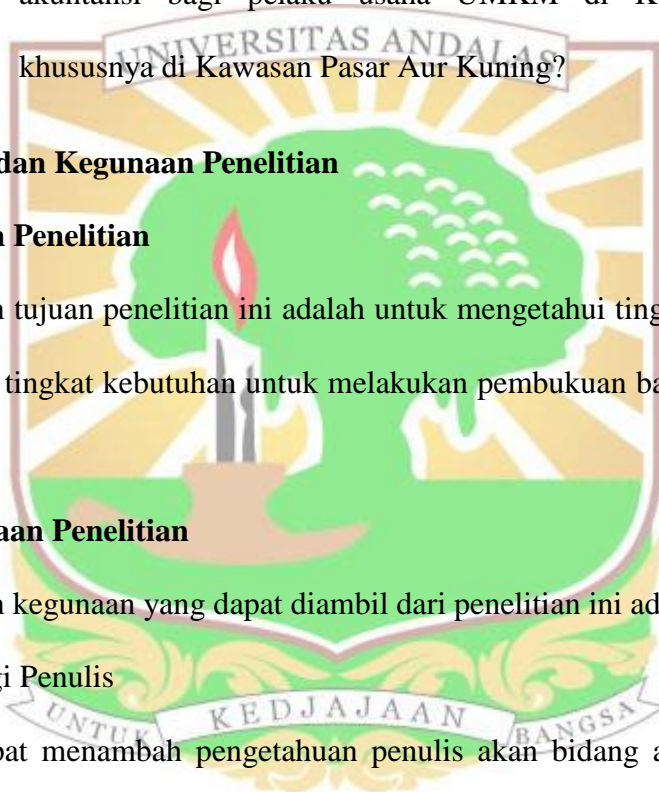
a. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan penulis akan bidang akuntansi dalam perspektif UMKM.

b. Bagi Praktisi Akuntansi

Menjadi referensi atau rujukan mengenai tingkat kesadaran akan akuntansi bagi masyarakat UMKM.

c. Bagi Pemerintah



Menjadi rujukan pemerintah akan tingkat kesadaran akuntansi bagi UMKM sehingga dapat menjadi informasi dalam hal perpajakan dan untuk menciptakan UMKM yang kompetitif.

